

**KEDUDUKAN ANAK DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM  
WARIS ADAT**

**(Study Kasus di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen)**

**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Disusun Oleh:**

**SYLVIANA ANGGARINI**  
**C100110132**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEDUDUKAN ANAK DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM  
WARIS ADAT**

**(Study Kasus di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Yang ditulis oleh:

**SYLVIANA ANGGARINI**  
**C 100110132**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Septarina', written over a horizontal line.

**(Septarina Budiwati, S.H., M.H.)**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **KEDUDUKAN ANAK DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT**

**(Study Kasus di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen)**

Yang ditulis oleh:

**SYLVIANA ANGGARINI**  
**C100110132**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada tanggal 31 Oktober 2016  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Dewan Penguji

Ketua : Septarina Budiwati, S.H.,M.H  
Sekertaris : Darsono S.H.,M.Hum  
Anggota : Shalman Al Farizy S.H.,M.M.,M.Kn

(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta  
  
**(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)**

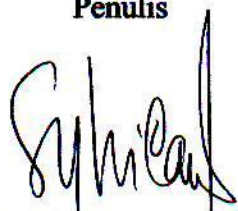
## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Oktober 2016

Penulis



Sylviana Anggarini  
C100110132

**KEDUDUKAN ANAK DALAM PEWARISAN MENURUT  
HUKUM WARIS ADAT  
(Study Kasus di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen)**

Sylviana Anggarini  
C 100110233  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
email: [SylviBagas@gmail.com](mailto:SylviBagas@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta warisan menurut hukum adat, serta kedudukan anak dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, jenis penelitian bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau obyek penelitian sebagaimana adanya. Menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi wawancara dan studi kepustakaan. Analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa data metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan kedudukan anak dalam hukum waris adat dapat digolongkan menjadi empat bagian, yakni anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak asuh. Keberadaan Anak kandung berhak mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya. Keberadaan anak angkat berhak mewarisi harta bersama orang tua angkatnya serta berhak untuk mewarisi harta orang tua kandungnya. Kedudukan anak tiri berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya dan tidak berhak untuk mewarisi harta asal dari orang tua tirinya. Sedangkan kedudukan anak asuh tidak berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang tua asuhnya, tetapi masih berhak untuk mewarisi dari harta dari orang tua kandungnya.

**Kata kunci:** *Kedudukan Anak, Hukum Waris Adat, dan Pewarisan*

**ABSTRACT**

*This research aims to know the Division of inheritance according to customary law, as well as the position of the child in the Division of inheritance according to customary law. The method of the approach used in this study is the empirical approach method, this type of research is both descriptive because this research aims to provide an overview of the State of the subject and object of research or as is. Using primary data and secondary data. Method of data collection in this research study by means of interviews and the study of librarianship. The analysis used in the study authors is a normative method of qualitative data analysis. Based on the results of the research and the discussion then it can be inferred that the existence and the position of the child in the customary law of inheritance can be classified into four parts, namely, children, adopted children, stepchildren and foster children. The whereabouts of the children entitled to inherit his parents ' heritage treasures. The existence of the adopted child has the right to inherit the property along with his adoptive parents as well as the right to inherit the property of his biological parents. The position of the stepchildren are eligible to inherit the possessions legacies of his parents and has no right to inherit the property of origin of his parents. While the position of foster care are not entitled to get the treasure relics of foster parents, but still has the right to inherit property from his parents.*

**Keywords:** *the position of the child, the law of Inheritance customs, and Inheritance*

## 1. PENDAHULUAN

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu di jalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus di kedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup.<sup>1</sup> Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.<sup>2</sup> Pengertian warisan sendiri adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>3</sup>

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>4</sup> Keberadaan anak dalam hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting. Keberadaan anak secara langsung akan mengakibatkan terjadinya proses

---

<sup>1</sup> Mg. Sri Wiyarti, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bagian B, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000, hal. 4.

<sup>2</sup> Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 11.

<sup>3</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995, hal. 161.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Perpindahan warisan dari orang tua kepada anaknya harus dilakukan secara baik, sesuai aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Salah satu aturan hukum yang digunakan dalam proses pembagian harta warisan adalah hukum adat. Secara sederhana hukum adat dapat di artikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>5</sup> Hukum adat selalu mengedepankan kesetaraan dengan tetap memandang kebersamaan sebagai acuan dalam proses pewarisan. Hukum adat yang tetap dijaga dan dijadikan pijakan bagi masyarakat memberi arti bahwa aturan tersebut tetap menjadi cita-cita luhur dari alam pikiran masyarakat. Keberadaan hukum adat sebagai salah satu lingkup dari hukum waris dalam pembagian harta warisan merupakan bentuk penghargaan masyarakat dalam menghargai tatanan dan aturan yang harus tetap dijaga dari lingkup keluarga, untuk mengedepankan musyawarah dan kebersamaan dalam membagi harta warisan.

Keberadaan hukum adat merupakan sebagai salah satu hukum yang dijadikan rujukan dan dasar dalam proses pembagian harta warisan. Keberadaan anak dalam pembagian warisan mempunyai kedudukan yang sangat penting, dimana keberadaan anak secara langsung akan menyebabkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Keberadaan hukum adat harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai budaya dan nilai-nilai luhur yang berkembang dan tumbuh sebagai patokan dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hal. 31.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi ini dengan memberikan judul, “Kedudukan Anak Dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat (Study Kasus Di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen)”. Dari rumusan di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pembagian harta warisan menurut hukum adat, serta untuk mengetahui kedudukan anak dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan, mengidentifikasi secara objektif dengan tujuan memberikan gambaran riil mengenai kedudukan anak dalam pewarisan menurut hukum waris adat. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau obyek penelitian sebagaimana adanya.<sup>7</sup> Penulis berupaya menggambarkan dan menganalisis kedudukan anak dalam pewarisan menurut hukum waris adat.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Slendro, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen mengenai pembagian harta warisan terhadap kedudukan anak berdasarkan hukum waris adat adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, 2003, hal. 19.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hal. 12.



### **Berdasarkan Hasil Penelitian Pada Contoh Kasus Pertama Tentang Pembagian Harta Warisan**

Pada hari yang telah ditetapkan oleh kepala desa, selaku ketua tokoh adat di desa slendro, melakukan musyawarah dengan para pihak pewaris dan ahli waris. Setelah melakukan diskusi dan musyawarah yang turut disaksikan para saksi dan juga kepala desa sebagai mediator dalam pembagian harta warisan, maka dapat dihasilkan musyawarah sebagai berikut:

Menetapkan tanah seluas 255 m<sup>2</sup> beserta bangunan yang terletak di Desa Slendro, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen dengan disertai sertifikat hak milik pewaris, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Tanah dan bangunan milik Satiya Graha, Sebelah Timur: Rumah bapak Sumadi, Sebelah Selatan: Rumah Ny. Dasuki, Sebelah Barat: Rumah bapak Sudarmadi, Adalah harta bersama antara Rahanti binti Rasmulyo dan Tarmono. Membagi harta bersama tersebut sebagaimana dalam kesepakatan musyawarah adalah seperempat bagian ( $\frac{1}{4}$ ) bagian untuk para ahli waris, yakni: (1) Mistanto (2) Sudarman (3) Sutanto (4) Sutarni

Mengenai masalah harta yang telah dibagi maka akan didaftarkan kepada kepala desa sebagai tanah dalam desa tersebut, selanjutnya setelah terdaftar di kantor desa, maka akan didaftarkan ke notaris sebagai tanah masing-masing pribadi ahli waris. Pembagian harta bersama tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak yang telah disetujui juga oleh pewaris. Mengenai pewaris Ibu Rahanti binti Rasmulyo akan ikut anak pertama yaitu Bapak Mistanto. Untuk selanjutnya mengenai biaya dan kebutuhan hidup untuk Ibu Rahanti binti Rasmulyo akan ditanggung secara bersama antara keempat ahli waris.

Demikian kesepakatan ini dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, yang disaksikan oleh masyarakat dan disahkan oleh kepala desa, apabila kemudian hari terjadi permasalahan maka para pihak bersedia mempertanggung

jawabkan secara hukum. Kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak harus mampu ditaati dan dilaksanakan, sebagai wujud kebersamaan dan tenggang rasa dalam kehidupan keluarga, tanpa harus mempermasalahkan lagi dikemudian hari.<sup>8</sup>

Pembagian harta warisan yang melibatkan para pihak juga harus dilakukan dengan dasar nilai keadilan, dimana para pihak yang terlibat dalam pembagian harta warisan tersebut harus mendapatkan bagian sesuai haknya masing-masing, serta juga harus melaksanakan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak sebagai ahli waris.<sup>9</sup>

#### **Berdasarkan Hasil Penelitian Pada Contoh Kasus Kedua Tentang Pembagian Harta Warisan**

Pada hari yang telah ditetapkan oleh kepala desa, selaku ketua tokoh adat di Desa Slendro, melakukan musyawarah dengan para pihak pewaris dan ahli waris. Dalam musyawarah tersebut juga dihadiri oleh masyarakat Desa Slendro sebagai saksi dalam pembagian harta warisan tersebut. Setelah melakukan diskusi dan musyawarah yang turut disaksikan kepala desa sebagai mediator dalam pembagian harta warisan, maka dapat dihasilkan musyawarah tentang pembagian harta warisan sebagai berikut:

Membagi tanah seluas 440 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dengan disertai sertifikat hak milik dengan batas-batas: Utara: Tanah dan bangunan milik Satiya Graha, Selatan: Tanah dan bangunan milik Dasuki, Barat: Tanah dan bangunan milik Darmadi, Timur: Tanah dan bangunan milik Sumadi. Terletak di Desa Slendro, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Membagi harta yang berupa tanah dan pekarangan yang berada di atasnya untuk dibagi menjadi dua bagian, mengingat tanah tersebut merupakan harta bersama antara

---

<sup>8</sup> Zaerudin, Pimpinan Desa di Desa Slendro, *Wawancara Pribadi*, Gesi, Selasa, 3 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

<sup>9</sup> Zaerudin, Pimpinan Desa di Desa Slendro, *Wawancara Pribadi*, Gesi, Selasa, 3 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

ibu waliyem dan bapak sudarto, yang dibeli pada saat pernikahan berlangsung. Berdasarkan musyawarah dan kesepakatan para pihak, maka masing-masing Ibu Wakiyem dan Bapak Pariyun mendapatkan (1/2) bagian. Mengingat tanah dan pekarangan rumah yang berdiri diatasnya pada saat dilakukan pembagian ditempati Ibu Wakiyem beserta Ibu Waliyem, maka berdasarkan kesepakatan para pihak antara Ibu Wakiyem dan Bapak Sudarto, maka tanah dan bangunan rumah yang bagian milik Bapak Sudarto tersebut akan diganti atau dibayar oleh Ibu Wakiyem.

Mengenai harta warisan yang berupa tanah sawah akan menjadi milik Bapak Pariyun sebagai anak kandung Bapak Sudarto, dimana tanah sawah tersebut merupakan harta bawaan Bapak Sudarto sebelum menikah, hal tersebut juga disetujui oleh Bapak Pariyun dan Ibu Waliyem. Untuk selanjutnya mengenai masalah harta yang telah dibagi maka akan didaftarkan kepada kepala desa sebagai tanah dalam desa tersebut, selanjutnya setelah terdaftar di kantor desa, maka akan didaftarkan ke notaris sebagai tanah masing-masing priadi ahli waris.

Pembagian harta bersama tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak yang telah disetujui juga oleh pewaris. Mengenai pewaris Ibu waliyem akan ikut anak pertama yaitu ibu wakiyem. Untuk selanjutnya mengenai biaya dan kebutuhan hidup untuk Ibu waliyem akan ditanggung secara bersama antara kedua ahli waris. Kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak harus mampu ditaati dan dilaksanakan, sebagai wujud kebersamaan dan tenggang rasa dalam kehidupan keluarga, tanpa harus mempermasalahkan lagi di kemudian hari.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Zaerudin, Pimpinan Desa di Desa Slendro, *Wawancara Pribadi*, Gesi, Selasa, 3 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

### **Berdasarkan Hasil Penelitian Pada Contoh Kasus Kedua Tentang Pembagian Harta Warisan**

Pada hari yang telah ditetapkan oleh kepala desa, selaku ketua tokoh adat di desa slendro, melakukan musyawarah dengan para pihak ahli waris, maka dapat dihasilkan musyawarah tentang pembagian harta warisan sebagai berikut:

Memberikan tanah luas 680 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, menjadi harta milik Ibu Suparmi selaku anak kandung dari pernikahan Bapak Sumanto dan Ibu Sumini. Memberikan tanah berupa sawah yang merupakan harta bawaan dari Bapak Sumanto menjadi milik Bapak Suparman, selaku anak kandung dari Bapak Suminto. Memberikan tanah berupa kebun yang merupakan harta bawaan dari Ibu Sumini menjadi milik Bapak Suharso, selaku anak kandung dari Ibu Sumini.

Mengenai Bapak Samingun tidak meminta bagian dari harta peninggalan Bapak Sumanto dan Ibu Sumini, hal tersebut dilakukan karena bapak samingun merupakan anak asuh dari Bapak Sumanto dan Ibu Sumini, beliau mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama menjadi anak angkat, dan beliau juga berkeinginan untuk tetap mempertahankan hubungan persaudaraan seperti yang diamanatkan oleh Bapak Sumanto dan Ibu Sumini. Untuk selanjutnya mengenai masalah harta yang telah dibagi maka akan didaftarkan kepada kepala desa sebagai tanah dalam desa tersebut, selanjutnya setelah terdaftar di kantor desa, maka akan didaftarkan ke notaris sebagai tanah masing-masing priadi ahli waris. Apabila kemudian hari terjadi permasalahan maka para pihak bersedia mempertanggung-jawabkan secara hukum. Kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak harus mampu ditaati dan dilaksanakan, sebagai wujud kebersamaan dan tenggang rasa dalam kehidupan keluarga, tanpa harus

mempermasalahkan lagi dikemudian hari, bagaimanapun nilai keadilan dan kekeluargaan merupakan dasar dalam pembagiannya.<sup>11</sup>

### **Kedudukan Anak dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat Kedudukan Anak Menurut Hukum Adat**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka secara umum kita akan mengetahui bahwa ada empat golongan anak dalam masyarakat adat Jawa, khususnya di Desa Slendro, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Masyarakat adat Jawa menggolongkan anak menjadi empat diantaranya: (1) Anak Kandung (2) Anak Angkat (3) Anak Tiri (4) Anak Asuh. Pada umumnya dan masyarakat Desa Slendro, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen khususnya, menurut hukum adat Jawa sistem pewarisan secara umum tanpa membedakan pewarisan terhadap anak maupun terhadap ahli waris lainnya sering menggunakan sistem pewarisan individual.

Berdasarkan macam sistem pewarisan yang ada, secara umum maka masyarakat Jawa termasuk kedalam sistem pewarisan individual, dimana dalam sistem itu yang menjadi ahli waris utama adalah anak. Hukum adat yang berlaku di Jawa, seorang anak mempunyai kedudukan yang istimewa jika dibandingkan dengan ahli waris yang lainnya. Realita kehidupan masyarakat Jawa dalam suatu keluarga hubungan orang tua dengan anak terkadang lebih erat dari pada hubungan orang tua dengan keluarga lainnya.<sup>12</sup> Realita inilah yang menyebabkan seorang anak diberi kedudukan istimewa selain karena memang kedudukannya yang kuat menurut ketentuan hukum adat dalam pewarisan, sebagai ahli waris utama. Selain itu secara teoritis sistem keturunan untuk kekerabatan dalam masyarakat hukum adat di Indonesia, khususnya hukum adat Jawa sering

---

<sup>11</sup> Zaerudin, Pimpinan Desa di Desa Slendro, *Wawancara Pribadi*, Gesi, Selasa, 3 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

<sup>12</sup> Zaerudin, Pimpinan Desa di Desa Slendro, *Wawancara Pribadi*, Gesi, Selasa, 3 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

menggunakan sistem parental dalam pewarisan. Sistem parental sendiri merupakan sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Sistem Parental dalam sistem keturunan masyarakat hukum adat sering digunakan oleh masyarakat adat Jawa, seperti masyarakat di daerah Sragen. Sistem parental dianggap lebih adil dan dapat mengakomodir nilai kebersamaan dalam keluarga. Tidak ada perbedaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam sistem pewarisannya, menyebabkan masyarakat lebih mudah dalam pembagiannya.

Keberadaan dan kedudukan anak dalam pemagian waris adat secara umum adalah sebagai berikut:

Anak Kandung, kedudukan anak kandung dalam pewarisan secara otomatis akan menerima harta warisan dari orang tuanya atau pewaris, setelah pewaris meninggal dunia maupun pewaris masih hidup dengan kesepakatan atau ketentuan tertentu. Anak kandung mempunyai posisi yang penting dalam proses pewarisan, sebagai penerima harta warisan dari pewaris yang secara otomatis akan melekat pada diri anak kandung, walau tanpa melakukan perbuatan apapun.<sup>13</sup>

Anak Tiri, kedudukan anak tiri dalam proses pewarisan tidak dapat mewarisi harta orang tua tirinya, walaupun kedudukan anak tiri sama dengan anak kandung dalam kehidupan keluarga, namun anak tiri tetap dapat menikmati harta warisan yang menjadi bagian dari orang tua kandungnya. Kedudukan mengenai harta warisan terhadap ibu tiri atau bapak tirinya dianggap anak itu bukan waris, akan tetapi hanya keluarga dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Anak Angkat, kedudukan anak angkat dan anak kandung dalam kehidupan keluarga mempunyai hak yang sama dalam hal mendapatkan kasih sayang dan

---

<sup>13</sup> Zaerudin, Pimpinan Desa di Desa Slendro, *Wawancara Pribadi*, Gesi, Selasa, 3 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

<sup>14</sup> Zaerudin, Pimpinan Desa di Desa Slendro, *Wawancara Pribadi*, Gesi, Selasa, 3 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

perhatian dari orang tuanya. Hukum waris adat memandang bahwa kedudukan anak angkat dapat mewarisi harta *gono-gini* dari orang tua angkatnya, sedangkan mengenai harta bawaan dari orang tua angkatnya, akan menjadi hak dari anak kandung. Anak angkat juga masih berhak untuk mewarisi dari harta orang tua kandungnya.

Anak Asuh, kedudukan anak asuh dalam hukum waris adat Jawa tetap memperoleh pembiayaan dasar kehidupan dan pendidikan selama masih menjadi anak asuh dari orang tua asuhnya, tetapi tidak akan memperoleh harta warisan dalam proses pewarisan dari orang tua asuhnya. Keberadaan harta warisan dari orang tua asuhnya akan tetap jatuh kepada anak kandungnya.<sup>15</sup>

### **Tentang Aturan Desa (Aturan Masyarakat Adat)**

Pembagian harta warisan di Desa Slendro, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen harus terlebih dahulu didaftarkan di Kantor Kepala Desa. Pembagian harta warisan terutama tentang tanah harus menghadirkan para pihak, yang dalam hal ini pewaris dan ahli warisnya, yang turut disaksikan perwakilan warga sebagai saksi. Pembagian harta warisan harus didasarkan musawarah dan mufakat. Pembagian warisan yang sudah disepakati bersama selanjutnya akan didaftarkan kepada kepala desa, sebagai tanah desa (adat).

Para pihak yang terkait wajib untuk menaati kesepakatan yang telah dibuat bersama. Apabila kemudian hari terjadi sengketa atau permasalahan lainnya, yang tidak bisa diselesaikan di kantor desa, maka dipersilakan kepada para pihak untuk mengajukan gugatan ke jalur hukum. Ketentuan aturan tersebut telah ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai bentuk ketaatan dan kerukunan antara

---

<sup>15</sup> Zaerudin, Pimpinan Desa di Desa Slendro, *Wawancara Pribadi*, Gesi, Selasa, 3 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

masyarakat satu dan masyarakat lainnya, dimana ketentuan tersebut akan selalu dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya.<sup>16</sup>

### **Tentang Pembagian Harta Warisnya**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis mengenai kedudukan anak dalam pembagian harta warisan, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian pada kasus yang pertama dalam hal pembagian harta warisan dari pasangan suami istri Rahanti binti Rasmulyo dan Tarmono binti Tarmin, berupa harta peninggalan tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang mempunyai empat orang anak yaitu Mistanto, Sudarman, Sutanto, dan Sutarni, maka harta warisan tersebut akan dibagi menjadi empat bagian. Hal tersebut didasarkan bahwa ke empat anak tersebut adalah anak kandung dari Rahanti binti Rasmulyo dan Tarmono binti Tarmin yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari orang tua kandungnya.

Berdasarkan hasil penelitian pada kasus yang kedua dalam hal pembagian harta warisan dari pasangan suami istri Ibu Waliyem dan Bapak Sudarto berupa harta peninggalan tanah dan bangunan rumah di atasnya dan tanah berupa sawah. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya adalah harta bersama, yang dibeli pada saat perkawinan berlangsung, sedangkan tanah sawah merupakan harta bawaan dari almarhum Bapak Sudarto. Pasangan suami istri Ibu Waliyem dan Bapak Sudarto mempunyai dua orang anak, yaitu Bapak Pariyun dan Ibu Waliyem. Bapak Pariyun sebagai anak kedua merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Ibu Waliyem dan Bapak Sudarto, sedangkan Ibu Wakiyem merupakan anak angkat Ibu Waliyem dan Bapak Sudarto. Berdasarkan kesepakatan para pihak maka harta peninggalan dari pewaris Ibu Waliyem dan

---

<sup>16</sup> Zaerudin, Pimpinan Desa di Desa Slendro, *Wawancara Pribadi*, Gesi, Selasa, 3 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.



Bapak Sudarto, akan dibagi sesuai ketentuan bahwa harta yang berupa tanah dan pekarangan yang berada di atasnya untuk dibagi menjadi dua bagian, mengingat tanah tersebut merupakan harta bersama antara ibu waliyem dan bapak sudarto, yang dibeli pada saat pernikahan berlangsung. Selanjutnya Mengenai harta warisan yang berupa tanah sawah akan menjadi milik Bapak Pariyun sebagai anak kandung Bapak Sudarto, hal tersebut didasarkan bahwa harta warisan berupa sawah merupakan harta bawaan Bapak Sudarto sebelum menikah dengan Ibu Waliyem, dengan demikian maka yang berhak mewarisi adalah anak kandung dari Bapak Sudarto, sedangkan Ibu Wakiyem sebagai anak angkat tidak berhak untuk mewarisi harta asal dari orang tua angkatnya, beliau hanya berhak mewarisi dari harta bersama orang tua angkatnya. Pembagian harta warisan tersebut dianggap telah dilakukan secara adil, karena para pihak telah menyetujui dan menyepakati hasil musyawarah pembagian harta warisan tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil penelitian pada kasus yang ketiga dalam hal pembagian harta warisan Bapak Sumanto dan Ibu Sumini berupa harta peninggalan tanah dan bangunan rumah di atasnya dan tanah berupa sawah, serta tanah berupa kebun. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya adalah harta bersama, yang dibeli pada saat perkawinan berlangsung antara Bapak Suminto dan Ibu Sumini. Tanah sawah merupakan harta bawaan dari Bapak Sumanto, sedangkan tanah kebun merupakan harta bawaan dari Ibu Sumini. Bapak Sumanto dan Ibu Sumini mempunyai empat orang anak yaitu Superman, Suharso, Samingun dan Suparmi. Bapak Superman adalah anak kandung dari Bapak Sumanto dan anak tiri dari ibu sumini. Bapak Suharso adalah anak kandung dari ibu sumini dan anak tiri dari bapak sumanto. Bapak Samingun adalah anak asuh dari Bapak Sumanto dan Ibu Sumini, sedangkan Ibu Suparmi adalah anak kandung dari pernikahan Bapak Sumanto dan Ibu Sumini. Mengenai pembagian harta warisanya maka tanah

---

<sup>17</sup> Zaerudin, Pimpinan Desa di Desa Slendro, *Wawancara Pribadi*, Gesi, Selasa, 3 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, menjadi harta milik Ibu Suparmi selaku anak kandung dari pernikahan Bapak Sumanto dan Ibu Sumini. Tanah berupa sawah yang merupakan harta bawaan dari Bapak Sumanto menjadi milik Bapak Suparman, selaku anak kandung dari Bapak Suminto. Sedangkan tanah berupa kebun yang merupakan harta bawaan dari Ibu Sumini menjadi milik Bapak Suharso, selaku anak kandung dari Ibu Sumini. Mengenai keberadaan dan kedudukan Bapak Samingun tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan Bapak Sumanto dan Ibu Sumini, hal tersebut didasarkan karena Bapak Samingun merupakan anak asuh dari Bapak Sumanto dan Ibu Sumini. Secara umum pembagian harta warisan yang dilakukan oleh para pihak telah disetujui, artinya pembagian tersebut telah mengakomodir nilai keadilan dan nilai kebersamaan yang ada dalam lingkup keluarga tersebut.<sup>18</sup>

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

*Pertama*, keberadaan dan kedudukan anak dalam hukum waris adat dapat digolongkan menjadi empat bagian, yakni anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak asuh. Keberadaan dan kedudukan anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak asuh tersebut mempunyai hak dan kewajiban dalam pembagian harta warisan yang harus dipenuhi.

*Kedua*, keberadaan Anak kandung berhak mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya. Anak angkat berhak mewarisi harta bersama orang tua angkatnya serta berhak mewarisi harta orang tua kandungnya. Anak tiri berhak mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya. Sedangkan anak asuh mendapatkan pembiayaan hidup orang tua angkatnya, dan berhak untuk mewarisi harta dari orang tua kandungnya.

---

<sup>18</sup> Zaerudin, Pimpinan Desa di Desa Slendro, *Wawancara Pribadi*, Gesi, Selasa, 3 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

## **Saran**

*Pertama*, dalam pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan melalui jalur musyawarah. Kesepakatan dan kebersamaan merupakan essensi utama dalam pembagian harta warisan. Diharapkan pembagian harta bersama dengan jalur musyawarah yang didasari nilai kebersamaan, maka hubungan kekeluargaan akan tetap rukun.

*Kedua*, perlu Bagi masyarakat dan tokoh adat diharapkan untuk tetap menjaga dan mempertahankan nilai dan aturan adat sebagai dasar dalam kehidupan masyarakat, khususnya mengenai pembagian harta warisan agar keberadaan hukum adat tersebut tetap terjaga dan lestari.

## **Persantunan**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Kedua orang tua saya tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Suamiku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya. Adik dan sahabat-sahabatku yang kusayangi, terimakasih atas do'a, dorongan dan semangatnya serta sahabat-sahabatku, atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahlan, Surini dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Alting, Husen, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Amiruddin, & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Wiyarti, Mg, 2000, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bagian B, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1995, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.